REPRESENTASI KETIDAKADILAN DALAM TUTURAN JURI PADA LOMBA CERDAS CERMAT EMPAT PILAR MPR RI: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS

Budi Hartono[1]
[1]UPTD SMP Negeri 2 Budong-Budong
[1]amirbudihartono@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the representation of injustice in judges' utterances during the Four Pillars Quiz Competition of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI). This study is motivated by a controversy over the assessment process in the competition, which revealed different treatment of participants' answers that were substantively similar. This research employed a qualitative approach using Fairclough's model of Critical Discourse Analysis. The data consisted of utterances by judges and competition officials appearing in a video of the Four Pillars Quiz Competition of MPR RI, particularly in the assessment of participants' answers regarding the process of selecting members of the Audit Board of Indonesia. The data were collected through documentation, observation, note-taking, and transcription. The data were analyzed through three dimensions: textual analysis, discursive practice, and social practice. The findings show that the representation of injustice appears in four forms: evaluative, procedural, interactional, and symbolic injustice. Evaluative injustice is reflected in different assessments of answers with similar substantive meaning. Procedural injustice appears through limited opportunities for clarification and verification. Interactional injustice is evident in responses that direct participants to accept decisions without adequate explanation. Symbolic injustice is reflected in the affirmation of judges' authority as the center of decision legitimacy. These findings indicate that judges' utterances cannot be understood as neutral speech, but rather as discursive practices that construct power relations between assessors and participants. This study recommends the need for judges' communication guidelines, transparent assessment rubrics, and evidence-based clarification mechanisms in academic competitions.

Keywords: critical discourse analysis, injustice, judges' utterances, Four Pillars Quiz Competition, MPR RI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi ketidakadilan dalam tuturan juri pada Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI. Kajian ini dilatarbelakangi oleh polemik penilaian dalam lomba yang memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan terhadap jawaban peserta yang secara substansial serupa. Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Data penelitian berupa tuturan juri dan perangkat lomba yang muncul dalam video Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, khususnya pada peristiwa penilaian jawaban peserta mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, simak, catat, dan transkripsi. Data dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi ketidakadilan muncul dalam empat bentuk, yaitu ketidakadilan evaluatif, prosedural, interaksional, dan simbolik. Ketidakadilan evaluatif tampak pada perbedaan penilaian terhadap jawaban yang substansinya serupa. Ketidakadilan prosedural muncul melalui terbatasnya ruang klarifikasi dan verifikasi. Ketidakadilan interaksional tampak pada respons yang mengarahkan peserta untuk menerima keputusan tanpa penjelasan memadai. Ketidakadilan simbolik terlihat melalui penegasan otoritas juri sebagai pusat legitimasi keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa tuturan juri tidak dapat dipahami sebagai ujaran netral, melainkan sebagai praktik wacana yang membentuk relasi kuasa antara penilai dan peserta. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman komunikasi juri, rubrik penilaian yang transparan, serta mekanisme klarifikasi berbasis bukti dalam lomba akademik.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, ketidakadilan, tuturan juri, LCC, Empat Pilar, MPR RI

A. Pendahuluan

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI merupakan salah satu ruang edukatif yang diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, demokrasi, dan kehidupan bernegara. MPR RI (2026 menegaskan bahwa LCC Empat Pilar MPR menjadi sarana dalam penguatan nilai kebangsaan generasi muda, tertutama dalam memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, penyelenggaraan lomba semacam ini idealnya tidak hanya menekankan ketepatan jawaban, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, penghargaan terhadap pendapat, serta akuntabilitas dalam proses penilaian.

Dalam konteks lomba akademik, juri memiliki posisi yang sangat strategis karena berwenang menentukan benar atau salahnya

jawaban, memberi skor, merespons keberatan, dan menetapkan keputusan akhir. Kewenangan tersebut menjadikan tuturan juri tidak dapat dipahami sebagai ujaran biasa. Tuturan juri merupakan praktik evaluatif yang memiliki konsekuensi langsung terhadap posisi peserta dalam kompetisi. Ketika juri menyatakan jawaban salah, memberikan pengurangan nilai, menolak klarifikasi, atau menegaskan kewenangan dewan juri, tuturan tersebut bukan hanya menyampaikan keputusan, tetapi juga memproduksi relasi kuasa antara pihak penilai dan pihak yang dinilai.

Permasalahan muncul ketika proses penilaian tidak dipersepsikan berlangsung secara konsisten, transparan, dan setara. Dalam asesmen yang adil, peserta seharusnya memperoleh perlakuan yang sama terhadap jawaban yang memiliki substansi serupa, ruang klarifikasi yang memadai, serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baniasadi et al. (2023) menegaskan bahwa keadilan asesmen mencakup dimensi prosedural, interaksional, distributif, dan validitas. Dengan demikian, keadilan dalam lomba cerdas cermat tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa skor, tetapi juga dengan proses pemberian keputusan, cara juri berinteraksi dengan peserta, dan konsistensi penerapan kriteria penilaian.

Polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 memperlihatkan pentingnya kajian terhadap tuturan juri dalam arena lomba akademik. KompasTV (2026), dalam video berjudul Viral *Cerdas Cermat 4 pilar MPR: MC Minta Maaf, Peserta Lomba Buka Suara,* menampilkan adanya keberatan peserta terhadap keputusan penilaian dalam lomba tersebut. Sejalan dengan itu, Rizal dan CP (2026) dalam laporan *detikEdu* menjelaskan kronologi polemik cerdas cermat Empat Pilar, termasuk persoalan jawaban peserta, permintaan maaf MPR, serta dugaan kendala speaker yang memengaruhi keterdengaran jawaban. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan penilaian dalam lomba lisan tidak hanya menyangkut benar atau salahnya jawaban, tetapi juga menyangkut kejelasan prosedur, kualitas komunikasi, perangkat teknis, dan legitimasi otoritas juri.

Dalam perspektif fairness, keputusan penilaian tidak dapat dilepaskan dari bukti, prosedur, konteks, dan konsekuensi sosialnya. Asesmen merupakan sistem kompleks yang melibatkan interaksi antara penilai, bukti penilaian, prosedur, transparansi, dan pemangku kepentingan (Valentine et al., 2023). Pandangan ini relevan dengan lomba cerdas cermat karena jawaban peserta disampaikan secara lisan, sehingga potensi persoalan dapat muncul dari artikulasi, kualitas perangkat audio, persepsi pendengaran juri, serta ketersediaan mekanisme verifikasi. Apabila keberatan peserta tidak ditindaklanjuti melalui prosedur klarifikasi yang terbuka, maka keputusan juri berpotensi dipahami sebagai keputusan otoritatif yang kurang akuntabel.

Selain itu, keadilan dalam penilaian juga berkaitan dengan cara peserta diperlakukan dalam interaksi. McNamara & Knoch (2019) menekankan bahwa fairness dan justice dalam asesmen tidak hanya berkaitan dengan akurasi pengukuran, tetapi juga dengan dampak sosial, perlakuan terhadap peserta, dan legitimasi keputusan penilaian. Dalam konteks Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, tuturan yang meminta peserta menerima keputusan, menegaskan hak juri memberi pengurangan nilai, atau menutup ruang keberatan dapat dipahami sebagai bagian dari praktik wacana yang mengatur posisi peserta. Tuturan semacam itu berpotensi merepresentasikan ketidakadilan interaksional dan simbolik apabila tidak disertai penjelasan rasional serta mekanisme pembuktian yang memadai.

Analisis Wacana Kritis menjadi pendekatan yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena bahasa dipandang sebagai praktik sosial yang berhubungan dengan kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan. Fairclough (2023) menegaskan bahwa Analisis Wacana Kritis merupakan bagian dari analisis sosial kritis yang menempatkan wacana dalam hubungan dengan unsur-unsur sosial lain, termasuk relasi kuasa, ideologi, institusi, dan identitas sosial. Dengan demikian, tuturan juri dalam cerdas cermat perlu dibaca bukan hanya sebagai bentuk komunikasi penilaian, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dapat membangun, mempertahankan, atau

melegitimasi posisi dominan penilai terhadap peserta.

Sejalan dengan itu, Wodak & Meyer (2015) menempatkan Analisis Wacana Kritis sebagai pendekatan interdisipliner untuk menjelaskan bagaimana bahasa beroperasi dalam struktur sosial dan relasi kuasa. Sejalan dengan itu, Mullet (2018) menjelaskan bahwa Analisis Wacana Kritis dalam penelitian pendidikan dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan menjelaskan cara wacana membentuk atau melegitimasi ketimpangan. Berdasarkan perspektif ini, tuturan juri pada lomba cerdas cermat tidak hanya dianalisis dari aspek kebahasaan, tetapi juga dari fungsi sosialnya dalam membentuk otoritas, kepatuhan, dan legitimasi keputusan.

Kajian ini penting karena penelitian tentang Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI selama ini lebih banyak dipahami dalam kerangka sosialisasi nilai kebangsaan, pendidikan Pancasila, dan penguatan karakter kewargaan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah tuturan juri sebagai praktik wacana yang dapat merepresentasikan ketidakadilan masih relatif terbatas. Padahal, jika lomba ini membawa misi pendidikan demokrasi dan kebangsaan, maka proses interaksi di dalamnya juga harus merefleksikan nilai-nilai demokratis, terutama keadilan, keterbukaan, penghargaan terhadap suara peserta, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada representasi ketidakadilan dalam tuturan juri pada Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI. Fokus kajian diarahkan pada empat bentuk ketidakadilan, yaitu ketidakadilan evaluatif, prosedural, interaksional, dan simbolik. Ketidakadilan evaluatif berkaitan dengan perbedaan penilaian terhadap jawaban yang substansinya serupa. Ketidakadilan prosedural berkaitan dengan terbatasnya mekanisme klarifikasi dan verifikasi. Ketidakadilan interaksional berkaitan dengan cara keberatan peserta direspons dalam forum lomba. Ketidakadilan simbolik berkaitan dengan penegasan otoritas juri sebagai pusat legitimasi keputusan. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana tuturan juri merepresentasikan ketidakadilan dan bagaimana relasi

kuasa antara juri dan peserta dikonstruksi dalam praktik diskursif lomba akademik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap representasi ketidakadilan dalam tuturan juri pada Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, terutama dalam kaitannya dengan relasi kuasa, otoritas penilaian, dan posisi peserta dalam kompetisi.

Data penelitian berupa tuturan juri yang mengandung indikasi ketidakadilan, seperti penolakan jawaban, koreksi, pemberian skor, respons terhadap keberatan, dan penetapan keputusan. Sumber data diperoleh dari rekaman video, transkrip, atau dokumentasi pelaksanaan lomba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, simak, catat, dan transkripsi.

Analisis data dilakukan melalui tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Analisis teks digunakan untuk mengkaji pilihan kata, modalitas, kalimat imperatif, bentuk koreksi, dan penegasan keputusan. Analisis praktik diskursif digunakan untuk melihat proses produksi dan penggunaan tuturan juri dalam perlombaan. Analisis praktik sosial digunakan untuk menafsirkan hubungan tuturan dengan relasi kuasa dan prinsip keadilan. Keabsahan data dijaga melalui pembacaan berulang, triangulasi sumber, dan diskusi sejawat.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi ketidakadilan dalam tuturan juri pada Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tampak melalui empat pola utama, yaitu ketidakadilan evaluatif, prosedural, interaksional, dan simbolik. Temuan ini diperoleh dari peristiwa penilaian jawaban peserta pada sesi rebutan yang berkaitan dengan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peristiwa tersebut, jawaban salah satu regu dinilai keliru dan memperoleh pengurangan nilai, sedangkan jawaban regu lain yang secara substansial serupa dinilai benar. Fenomena ini menunjukkan bahwa tuturan juri tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi

juga sebagai praktik wacana yang merepresentasikan relasi kuasa dalam arena kompetisi.

Kode Data	Fragmen Tuturan/ Peristiwa tuturan	Konteks Tuturan	Bentuk Ketidak-adilan
D1	”Nilai minus 5”	Soal tentang proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Jawaban peserta memuat unsur DPR, DPD, dan Presiden, tetapi dinilai salah	Ketidak-adilan evaluatif
D2	”Jawaban Grup B diterima sebagai benar meskipun secara substansial serupa dengan jawaban Grup C”	Pada sesi berikutnya, peserta dari grup lain menyampaikan jawaban yang memuat unsur pemilihan oleh DPR, pertimbangan DPD, dan pengesahan Presiden. Jawaban tersebut diterima.	Ketidak-adilan evaluatif
D3	”Pertimbangan dari DPD-nya tidak ada”	Juri menjelaskan alasan penolakan jawaban Grup C dengan menyatakan bahwa unsur DPD tidak terdengar atau tidak muncul dalam jawaban peserta.	Ketidak-adilan prosedural
D4	”Peserta menyatakan telah menyebut unsur DPD dalam jawaban-nya”	Peserta Grup C melakukan klarifikasi setelah jawaban-nya dinilai salah dan dikenai pengurangan nilai.	Ketidak-adilan prosedural
D5	”Mohon diterima”	Tuturan muncul ketika peserta menyampaikan keberatan terhadap keputusan juri. Peserta diarahkan untuk menerima keputusan yang telah ditetapkan	Ketidak-adilan interaksional
D6	”Keputusan saya kira di dewan Juri”	Tuturan menegaskan bahwa keputusan berada pada otoritas juri, bukan pada peserta atau pihak lain yang menyaksikan peristiwa tutur	Ketidak-adilan simbolik
D7	”Artikulasi itu penting”	Alasan artikulasi digunakan untuk menjelaskan mengapa jawaban peserta tidak diterima.	Ketidak-adilan prosedural
D8	”Dewan Juri berhak memberi pengurangan nilai”	Tuturan digunakan untuk menegaskan kewenangan juri dalam	Ketidak-adilan simbolik

	memberi-kan konse-kuensi nilai kepada peserta.

1. Ketidakadilan Evaluatif dalam Pemberian Nilai

Ketidakadilan evaluatif tampak ketika jawaban peserta yang secara substansial serupa memperoleh perlakuan nilai yang berbeda. Pada data video, peserta dari Grup C menyampaikan jawaban bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Namun, jawaban tersebut dinilai salah dan dikenai pengurangan nilai (D1). Pada sesi berikutnya, jawaban dari Grup B yang memuat substansi sama justru diterima sebagai jawaban benar (D2).

Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya problem konsistensi evaluatif. Dalam asesmen yang adil, jawaban peserta seharusnya dinilai berdasarkan kriteria yang sama, terutama apabila substansi jawabannya memiliki kesepadanan makna. Baniasadi et al. (2023) menegaskan bahwa keadilan asesmen mencakup dimensi prosedural, interaksional, distributif, dan validitas. Dengan merujuk pada pandangan tersebut, pemberian nilai berbeda terhadap jawaban yang substansinya sama dapat dibaca sebagai bentuk gangguan terhadap validitas dan konsistensi penilaian.

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, keputusan juri bukan sekadar keputusan teknis, melainkan praktik sosial yang memiliki konsekuensi terhadap posisi peserta. Mullet (2018) menjelaskan bahwa Analisis Wacana Kritis digunakan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan menjelaskan cara wacana membentuk serta melegitimasi ketimpangan sosial. Dalam kasus ini, tuturan penilaian juri membentuk ketimpangan karena satu peserta dirugikan oleh interpretasi juri, sementara peserta lain memperoleh keuntungan dari standar penilaian yang tampak berbeda. Dengan demikian, ketidakadilan evaluatif dalam data ini tidak hanya berkaitan dengan selisih skor, tetapi juga dengan legitimasi keputusan yang tidak sepenuhnya transparan.

2. Ketidakadilan Prosedural dalam Mekanisme Klasifikasi

Ketidakadilan prosedural muncul ketika peserta berupaya

mengklarifikasi jawaban, tetapi proses klarifikasi tidak berkembang menjadi verifikasi yang setara dan terbuka. Setelah jawaban Grup C dinyatakan keliru, peserta menyampaikan keberatan karena merasa telah menyebut unsur DPD. Namun, respons juri lebih menekankan bahwa unsur tersebut tidak terdengar atau tidak dianggap muncul dalam jawaban peserta.

Tuturan seperti *"pertimbangan dari DPD-nya tidak ada"* (D3) memperlihatkan bahwa otoritas penilaian sepenuhnya berada pada persepsi juri. Dalam lomba berbasis jawaban lisan, kemungkinan gangguan artikulasi, kualitas suara, atau keterdengaran perlu diperiksa melalui prosedur yang jelas. Valentine et al. (2023) menegaskan bahwa fairness dalam asesmen merupakan sistem kompleks yang tidak hanya ditentukan oleh keputusan individu, tetapi juga oleh prosedur, bukti, keahlian penilai, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan demikian, mekanisme klarifikasi seharusnya menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa keputusan juri tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara prosedural.

Pada level praktik diskursif, klarifikasi peserta tidak memperoleh ruang negosiasi yang memadai. Juri tetap menjadi pusat penentu kebenaran, sedangkan peserta berada pada posisi subordinat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa prosedur lomba belum sepenuhnya memberi ruang bagi peserta untuk mempertahankan hak argumentatifnya. Dalam konteks ini, ketidakadilan prosedural tampak bukan hanya pada keputusan akhir, tetapi juga pada terbatasnya mekanisme pembuktian, verifikasi ulang, dan penjelasan terbuka terhadap keberatan peserta.

3. Ketidakadilan Interaksional dalam Respons terhadap Keberatan Peserta

Ketidakadilan interaksional terlihat pada cara keberatan peserta direspons dalam forum lomba. Salah satu tuturan yang muncul dalam peristiwa tersebut adalah permintaan agar peserta menerima keputusan juri Tuturan seperti *"mohon diterima" (D5) s*ecara permukaan, tuturan tersebut tampak santun. Namun, secara diskursif, tuturan itu berfungsi menutup ruang keberatan dan mengarahkan peserta untuk tunduk

pada keputusan yang telah ditetapkan.

Keadilan interaksional berkaitan dengan cara peserta diperlakukan dalam proses penilaian. Baniasadi et al. (2023) memasukkan fairness interaksional sebagai salah satu komponen penting dalam asesmen yang adil. Artinya, penilaian tidak cukup hanya benar secara hasil, tetapi juga harus memperhatikan penghormatan, penjelasan, dan perlakuan komunikatif terhadap peserta. Dalam konteks ini, respons yang meminta peserta menerima keputusan tanpa penjelasan memadai dapat merepresentasikan ketidakadilan interaksional.

Dalam kerangka Wodak & Meyer (2015), bahasa selalu berhubungan dengan kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial. Tuturan juri atau perangkat lomba yang mengarahkan peserta untuk menerima keputusan memperlihatkan bagaimana bahasa bekerja untuk mempertahankan otoritas. Peserta tidak diposisikan sebagai subjek dialogis yang dapat mempertanyakan dasar keputusan, tetapi sebagai pihak yang harus menerima hasil penilaian. Oleh karena itu, ketidakadilan interaksional dalam data ini tampak pada melemahnya posisi peserta dalam interaksi, meskipun peserta sedang berupaya mempertahankan kebenaran jawabannya.

4. Ketidakadilan Simbolik melalui Penegasan Otoritas Juri

Ketidakadilan simbolik tampak melalui penegasan otoritas juri dalam menentukan nilai. Dalam data, alasan artikulasi digunakan untuk membenarkan keputusan pengurangan nilai. Tuturan seperti *“artikulasi itu penting”* dan *“Dewan Juri berhak”* (D6, D8) menunjukkan bahwa kewenangan juri diposisikan sebagai dasar utama legitimasi keputusan.

Secara institusional, juri memang memiliki otoritas dalam lomba. Namun, otoritas tersebut dapat berubah menjadi dominasi apabila tidak disertai transparansi dan mekanisme pembuktian yang memadai. McNamara & Knoch (2019) menekankan bahwa fairness dalam asesmen berkaitan erat dengan keadilan, konsekuensi sosial, dan perlakuan terhadap peserta. Dalam kasus ini, keputusan juri tidak hanya berdampak pada skor, tetapi juga pada pengalaman psikologis peserta, legitimasi hasil lomba, dan

kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kompetisi.

Ketidakadilan simbolik terjadi karena otoritas juri lebih dominan dibandingkan hak peserta untuk memperoleh penjelasan yang setara. Pada titik ini, bahasa menjadi alat legitimasi kuasa. Keputusan juri direpresentasikan sebagai kebenaran institusional, sementara klaim peserta terhadap jawabannya sendiri ditempatkan pada posisi yang lebih lemah. Tuturan yang menegaskan kewenangan juri memperlihatkan bagaimana kuasa bekerja melalui bahasa dan bagaimana peserta ditempatkan dalam posisi subordinat dalam arena lomba.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam tuturan juri tidak hanya terletak pada hasil akhir penilaian, tetapi juga pada proses diskursif yang menyertai keputusan tersebut. Ketidakadilan evaluatif muncul melalui perbedaan nilai terhadap jawaban yang substansinya serupa. Ketidakadilan prosedural tampak pada tidak optimalnya mekanisme klarifikasi. Ketidakadilan interaksional terlihat pada respons yang membatasi keberatan peserta. Sementara itu, ketidakadilan simbolik tampak pada penegasan otoritas juri sebagai pusat legitimasi keputusan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tuturan juri dalam lomba akademik tidak dapat dipahami sebagai ujaran netral. Sebagaimana dijelaskan Mullet (2018), wacana dapat membentuk dan melegitimasi ketimpangan sosial melalui pilihan bahasa yang tampak biasa. Dalam konteks Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, tuturan penilaian, klarifikasi, dan penegasan keputusan menjadi sarana pembentukan relasi kuasa antara juri dan peserta. Juri berada pada posisi dominan karena memiliki hak menentukan benar-salah, sedangkan peserta berada pada posisi subordinat karena keberatannya bergantung pada penerimaan pihak juri.

Temuan ini juga memperkuat pandangan Valentine et al. (2023) bahwa fairness dalam asesmen tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai keputusan benar atau salah. Fairness merupakan hasil interaksi antara bukti, prosedur, keahlian penilai, transparansi, dan keterlibatan peserta. Oleh sebab itu, dalam lomba berbasis jawaban lisan, kejelasan kriteria, kualitas perangkat teknis, rekaman pembanding, serta

mekanisme sanggahan menjadi bagian penting untuk menjamin keadilan penilaian.

Dalam konteks pendidikan kewargaan, persoalan ini memiliki makna yang lebih luas. Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI membawa misi penguatan nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, dan kebinekaan. Oleh karena itu, praktik penilaian dalam lomba seharusnya mencerminkan nilai yang disosialisasikan, khususnya keadilan, keterbukaan, penghargaan terhadap pendapat, dan tanggung jawab. Apabila proses penilaian justru memperlihatkan ketimpangan komunikasi, maka terjadi jarak antara nilai yang diajarkan dan praktik yang ditampilkan dalam arena lomba.

Representasi ketidakadilan dalam tuturan juri dapat dipahami sebagai persoalan linguistik, pedagogis, dan institusional. Secara linguistik, ketidakadilan tampak melalui pilihan kata dan penegasan otoritas. Secara pedagogis, ketidakadilan berdampak pada pengalaman belajar dan psikologis peserta. Secara institusional, ketidakadilan memengaruhi legitimasi penyelenggaraan lomba. Oleh karena itu, diperlukan pedoman komunikasi juri, rubrik penilaian yang transparan, mekanisme klarifikasi berbasis bukti, serta pelatihan etika penjurian agar lomba akademik benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang menjadi substansi pendidikan kebangsaan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tuturan juri pada Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI merepresentasikan ketidakadilan melalui empat bentuk utama, yaitu ketidakadilan evaluatif, prosedural, interaksional, dan simbolik. Ketidakadilan evaluatif tampak pada perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang secara substansial serupa. Ketidakadilan prosedural muncul melalui terbatasnya ruang klarifikasi dan verifikasi terhadap keberatan peserta. Ketidakadilan interaksional terlihat dari respons yang mengarahkan peserta untuk menerima keputusan tanpa penjelasan yang memadai. Sementara itu, ketidakadilan simbolik tampak melalui penegasan otoritas juri sebagai pusat legitimasi keputusan.

Berdasarkan perspektif Analisis Wacana Kritis, tuturan juri tidak dapat

dipahami sebagai ujaran netral karena memiliki fungsi sosial dalam menentukan posisi peserta, membentuk relasi kuasa, dan melegitimasi keputusan penilaian. Dalam konteks lomba akademik, bahasa menjadi instrumen penting yang tidak hanya menyampaikan hasil penilaian, tetapi juga dapat memperkuat dominasi pihak penilai terhadap peserta. Oleh karena itu, ketidakadilan dalam lomba tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa skor, tetapi juga dengan proses komunikasi, konsistensi kriteria, transparansi prosedur, dan perlakuan terhadap peserta.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI sebagai ruang pendidikan kebangsaan perlu mencerminkan nilai-nilai yang disosialisasikan, terutama keadilan, keterbukaan, demokrasi, dan penghargaan terhadap pendapat. Untuk itu, diperlukan pedoman komunikasi juri, rubrik penilaian yang transparan, mekanisme klarifikasi berbasis bukti, serta evaluasi teknis terhadap perangkat lomba, khususnya dalam lomba berbasis jawaban lisan. Dengan langkah tersebut, penyelenggaraan lomba akademik dapat lebih akuntabel dan selaras dengan tujuan pendidikan kewargaan yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Baniasadi, A., Salehi, K., Khodaie, E., Bagheri Noaparast, K., & Izanloo, B. (2023). Fairness in classroom assessment: A systematic review. *The Asia-Pacific Education Researcher*, *32*(1), 91–109.

Fairclough, N. (2023). Critical discourse analysis. In M. Handford & J. P. Gee (Eds.), *The Routledge handbook of discourse analysis* (2nd ed.). Routledge.

KompasTV. (2026). *Viral cerdas cermat 4 Pilar MPR: MC minta maaf, peserta lomba buka suara* [Video]. YouTube

McNamara, T., & Knoch, U. (2019). *Fairness, justice and language assessment*. Oxford University Press.

MPR RI. (2026). LCC *Empat Pilar MPR jadi sarana penguatan nilai kebangsaan generasi muda.* Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mullet, D. R. (2018). A general critical discourse analysis framework for educational research. *Journal of Advanced Academics*, *29*(2), 116–142.

Rizal, A. A., & CP, O. A. (2026, Mei 12). Kronologi polemik cerdas cermat 4 Pilar, MPR minta maaf-speaker disebut bermasalah. *detikEdu.*

Valentine, N., Durning, S. J., Shanahan, E. M., & Schuwirth, L. (2023). Fairness in assessment: identifying a complex adaptive system. *Perspectives on Medical Education*, *12*(1), 315.

Wodak, R., & Meyer, M. (2015). *Methods of critical discourse studies*. sage.